



Solusi

Mengingat kompleksitas campuran kelompok motif dan etnis, program kemitraan dengan masyarakat sekitar HH harus menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik penggunaan lahan, memperjelas hak akses ke HH, penegakan batas-batas wilayah, dan pengembangan alternatif ekonomi. Tidak semua kelompok masyarakat berkomitmen untuk mendukung program konsesi Restorasi Ekosistem (RE) yang berkelanjutan, sehingga HH harus mengembangkan strategi yang disesuaikan dengan berbagai kelompok masyarakat yang ada. Kemitraan masyarakat merupakan sarana untuk mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat yang ada didalam dan sekitar wilayah konsesi RE. Program kemitraan masyarakat HH berusaha untuk menjaga

dan meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya hutan Harapan sekaligus mempromosikan mata pencaharian bagi masyarakat setempat.

Program kemitraan masyarakat terdiri dari empat kategori utama: kegiatan pembangunan ekonomi dengan fokus khusus pada Batin Sembilan, insentif untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan terutama perambahan; melahirkan dukungan dari semua masyarakat sekitar dan bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memastikan bahwa program kemitraan ini memberikan layanan kepada masyarakat setempat. Program kemitraan masyarakat dapat dikembangkan jika kesepakatan pengelolaan sumberdaya desa/masyarakat (VRMA/CRMA) tercapai.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan program kemitraan:

- ▶ Memobilisasi aset masyarakat dengan menekankan pada apa yang dimiliki masyarakat. Aset-aset tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraannya. Pendekatan partisipatif merupakan cara utama untuk memahami aset masyarakat.
- ▶ Menciptakan suasana saling menghormati atau membangun kepercayaan.
- ▶ Mencapai kesepakatan bersama melalui VRMA/CRMA. Perjanjian Kemitraan masyarakat memainkan peran penting dalam menstabilkan penggunaan lahan, membangun komitmen masyarakat dan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat .
- ▶ Membuat rencana kerja yang jelas dengan mengacu pada hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, penghargaan atas kesabaran dan lamanya waktu yang diperlukan. Langkah ini diperlukan dalam implementasi VRMA/CRMA.
- ▶ Sejumlah kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat sedang dieksplorasi bekerjasama dengan masyarakat. Terdapat empat produk hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu, karet, jernang, getah jelutung dan madu.
- ▶ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan. Langkah tersebut untuk mengevaluasi dan meningkatkan program kemitraan yang lebih baik dan berkelanjutan.



Jl. Dadali No. 32, Bogor 16161 PO BOX 310/Boo, Bogor 16003, Indonesia
Phone: + 62 251 835 7222 | Fax: +62 251 835 7961 | E-mail: info@burung.org | www.burung.org



E-mail: info@harapanrainforest.org
Website: www.harapanrainforest.org

Fact Sheet

Pengembangan Kemitraan Masyarakat di Hutan Harapan



Disusun oleh:

Mangarah Silalahi, Asep Ayat, dan Thomas Walsh
(Burung Indonesia)

Untuk informasi lebih lanjut kontak:

Yulius (Manajer Kemitraan Masyarakat, Hutan Harapan)
E-mail: y.yulius@harapanrainforest.org



Hutan Harapan (HH) berada di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Terdapat sekitar 15.000 jiwa masyarakat yang tinggal di 6 desa dengan radius 10 km dari batas HH. Dari keenam desa tersebut, hanya satu desa (Desa Sako Suban) yang berada persis di bibir batas kawasan wilayah selatan HH. Dari semua kelompok etnis yang tinggal di dalam dan sekitar HH, hanya suku Batin Sembilan yang merupakan masyarakat adat atau masyarakat asli Sumatera bagian selatan.

Masyarakat Sekitar Hutan Harapan

Konsentrasi penduduk terbesar terdapat di bagian Utara dan Timur wilayah HH, yaitu Desa Bungku. Pada semua desa tersebut, terdapat para pendatang yang berasal dari Sumatera dan Jawa yang melakukan pembukaan hutan dan menanamnya dengan kelapa sawit. Jual beli lahan didalam kawasan hutan telah terjadi di wilayah desa-desa tersebut yang dilakukan oleh individu-individu dengan indikasi tanpa legalitas hukum yang jelas. Desa Sako Suban yang berada dibagian Selatan konsesi Hutan Harapan merupakan wilayah yang unik, desa tersebut telah ada sejak tahun 1900. Pada awalnya penduduk Desa Sako Suban adalah masyarakat Melayu lokal yang berasal dari Sumatera Selatan, selanjutnya selama bertahun-tahun jumlah populasi dan keragaman etnis terus bertambah dengan masuknya masyarakat dari Palembang dan Jawa pada tahun 1970-an. Sebagian besar masyarakat sudah tinggal menetap di kawasan desa yang berada di batas luar kawasan HH. Beberapa kelompok masyarakat tinggal di dalam kawasan HH, mereka berkebun karet campur hutan secara stabil selama 30 tahun terakhir dan beberapa keluarga juga bercocok tanam padi

gogo. Masyarakat desa berkebun kelapa sawit dan karet, serta memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti rotan, mengumpulkan buah jernang (*Calamus draco*) yang diperoleh dari rumpun yang berbeda dan getah pohon jelutung (*Dyera costulata*). Madu hutan juga dikumpulkan terutama oleh masyarakat Batin Sembilan dan para pendatang yang sudah masuk dalam skala bisnis. Selain kegiatan tersebut, pembalakan liar masih terjadi di beberapa wilayah dalam kawasan HH.

Berdasarkan data PT REKI, masyarakat yang telah menetap didalam dan sekitar HH dapat diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut: 1) Pekerja miskin (buruh tani) - mereka yang tidak memiliki lahan tetapi bekerja untuk orang lain (misalnya penyadap getah karet dan perawat kebun); 2) Petani miskin lahan yang mengklaim mempunyai lahan kurang dari 2 ha; 3) Petani mampu penggarap dengan lahan lebih dari 10 ha; 4) Pengusaha tani/investor yang mempekerjakan orang lain untuk mereka (100-200 ha); 5) Pendatang keluar masuk dengan frekuensi tertentu; 6) Masyarakat yang punya lahan tetapi tinggal diluar Harapan (seperti Bandung dan Medan).

Tantangan

Degradasi sumberdaya hutan secara terus-menerus berdampak negatif pada kesejahteraan kelompok masyarakat lokal seperti masyarakat Batin Sembilan yang mata pencahariannya bergantung pada hutan. Pada saat yang sama, PT REKI perlu membangun kerjasama dengan masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar wilayah konsesi untuk membantu menstabilkan penggunaan lahan dan merestorasi kawasan hutan yang telah rusak. Hilangnya keanekaragaman hayati dalam konsesi akibat perambahan dengan cepat menurunkan fungsi ekosistem hutan. Untuk itu sangat diperlukan suatu upaya penyelesaian konflik yang mengutamakan solusi yang saling menguntungkan.



Tantangan dalam mengembangkan Kemitraan yang saling menguntungkan dengan masyarakat:

- ▶ Perambahan merupakan tantangan utama terhadap integritas batas-batas konsesi HH.
- ▶ Proses perebutan lahan sedang berlangsung dimana hak-hak jangka panjang atas lahan tertentu belum diselesaikan dengan para pemangku kepentingan melalui klaim kepemilikan lahan.
- ▶ Konflik kepentingan dengan ragam motif antar anggota masyarakat seringkali mempersulit terciptanya kemitraan dengan masyarakat di tingkat desa.
- ▶ Promosi pembangunan ekonomi dalam kerangka restorasi ekosistem merupakan inisiatif yang relatif baru. Selalu ada kekhawatiran bahwa masyarakat tidak sabar akan hasil jangka panjang dan kembali ke pembalakan liar atau perambahan.
- ▶ Penegakan hukum masih lemah dan pemerintah tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menegakkan hukum secara adil dan konsisten pada isu-isu spekulasi atas tanah dan batas wilayah konsesi.

